

SISTEM KADERISASI DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILU 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)

Roni Tamara Saputra¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses sistem kaderisasi, proses penetapan calon anggota legislatif, pertimbangan partai Golkar dalam menetapkan calon anggota legislatif dari orang yang bukan dari kader Partai Golkar, dan strategi yang dilakukan oleh partai Golkar agar kader-kadernya tidak pindah ke partai lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2004-2009 menggunakan sistem Bottom Up (usulan dari bawah) dengan metode diskusi dan penyajian materi serta mengedepankan kader-kader dari tingkat desa atau yang lebih dikenal sebagai Karakterdes (Kaderisasi Tingkat Desa). Proses penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara pada pemilu 2009 menggunakan sistem tertutup, dimana dalam proses pengambilan keputusan, Ketua DPD Partai Golkar membentuk tim yang ditugaskan untuk menyeleksi kembali kandidat yang akan diusung oleh partai untuk menjadi calon legislatif melalui rapat Pleno. Partai Golkar dalam pemilu 2009 tidak menetapkan calon anggota legislatif yang bukan dari kader Golkar. Adapun yang menjadi bahan Pertimbangan Partai Golkar dalam menetapkan calon anggota legislatif yang bukan dari kader Partai Golkar seperti pada saat pemilu 2004 dan pemilu 2014 adalah dengan memberi pertimbangan beberapa aspek, seperti aspek finansial dan ketokohnya. Strategi partai Golkar dalam menjaga kader partai agar tidak pindah ke partai lainnya pada periode 2004-2009 dengan melibatkan pengurus-pengurus di tingkat desa dalam kegiatan-kegiatan partai agar selalu menjaga silaturahmi dan mempererat rasa kebersamaan antar setiap kader dari pengurus desa sampai pengurus kabupaten Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kata Kunci : Sistem Kaderisasi, Penetapan, Calon Legislatif Partai Golkar

Pendahuluan

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Roni Tamara Saputra, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman), email: roni.dzki12@gmail.com

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Pembahasan menarik tentu tentang peran dan fungsi pemerintah dalam memosisikan dirinya secara proporsional dan juga kemampuan partai politik untuk mengatur dirinya sendiri dan kemampuan untuk mempertahankan dominasi perannya dari intervensi kekuasaan .

Persoalan kaderisasi ini dikatakan sebagai persoalan penting karena sesungguhnya didalam partai perlu digodok pemimpin lokal maupun pemimpin nasional yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur. Untuk itu, sangat perlu dan mendesak bagi partai politik terutama para ketua umumnya untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. Mereka harus segera melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen politik didalam partai politik yang mereka pimpin sehingga bisa mendukung proses kaderisasi pemimpin nasional.

Apabila proses kaderisasi ini macet, maka transisi kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda juga akan macet. Kemandekan proses kaderisasi didalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan yang dalam dibanyak kalangan. Kekecewaan ini diwujudkan dengan pembentukan partai-partai politik baru dan munculnya wacana calon perseorangan ditengah keinginan kolektif membangun sebuah sistem demokrasi perwakilan yang memosisikan partai politik sebagai satu-satunya agen perubahan.

Seperti halnya partai politik pada umumnya, partai Golkar dalam hal memilih calon anggota legislatif haruslah seorang individu yang mengerti tentang azas, idiologi, platform, peraturan partai dan juga merupakan orang yang dikehendaki oleh rakyat atau para konstituen. Hal ini dapat dimengerti karena seorang calon anggota legislatif jika terpilih nantinya haruslah memperjuangkan kepentingan partai yang mengusungnya. Dengan demikian ini akan menjamin tetap sterilnya tujuan besar partai dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak memahami arah dan perjuangan partai Golkar. Dan partai Golkar juga akan terhindar dari para kutu loncat/opportunis partai.

Kerangka Dasar Teori

Sistem Kaderisasi

Sebelum membahas pengertian sistem kaderisasi ada baiknya jika kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem, agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu bias. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan pengertian sistem. Salah satunya adalah Prof. Soemantri (1976:17) sistem adalah “sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan”

Sementara itu Kaderisasi adalah proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak mereka menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih baik ([http://forum.upi.edu/index .php?topic=5757.0](http://forum.upi.edu/index.php?topic=5757.0)).

Dari pernyataan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kaderisasi adalah bagian dari serangkaian kegiatan penyiapan sumber daya manusia secara terdidik atau secara berkesinambungan agar kelak menghasilkan para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik sekaligus mencari kader militan (sungguh-sungguh) yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dari sistem kaderisasi adalah suatu rangkaian kegiatan penyiapan sumber daya manusia secara terdidik atau secara berkesinambungan guna menghasilkan para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik sekaligus menjadi kader militan (sungguh-sungguh) yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama.

Calon Anggota Legislatif

Sebelum membahas pengertian calon legislatif ada baiknya jika kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lembaga legislatif agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu bias. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan lembaga legislatif. Salah satunya adalah Menurut Budiarto (2006:173) badan legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya di anggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan dewan perwakilan rakyat.

Sedangkan menurut Syafii (2002:45) Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan, tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya pada masing-masing Negara.

Selanjutnya menurut Pitkin dalam Toni, Efriza, dan Kemal (2006: 102-103) perwakilan politik dimaksudkan sebagai “Proses mewakili dimana wakil bertindak dalam rangka beraksi kepada kepentingan terwakil. Walau wakil bertindak secara bebas tapi harus bijaksana dan penuh pertimbangan serta tidak sekedar melayani. Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara dia dengan terwakil tidak terjadi konflik dan jika terjadi penjelasan harus mampu menjelaskannya.

Menurut Grazia (dalam Toni, Efriza, dan kemal, 2006:102) perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan calon anggota legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pada dasarnya lembaga legislatif mempunyai tugas merumuskan

kebijakan umum (*Public policy*) yang mengikat seluruh rakyat dalam bentuk undang-undang, dan pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik dan dipilih melalui pemilihan umum. Dalam penelitian ini, yang menjadi calon anggota legislatif adalah calon anggota legislatif dari partai Golkar.

Pemilu

Ada beberapa definisi mengenai pemilu, di antaranya adalah menurut Duc (dalam King, 2002: 109-110) menyatakan bahwa pemilu adalah sebuah lembaga politik yang mendorong (*leads*) dan mencerminkan banyak kecenderungan sosial, politik, dan ekonomi. Meski pemilihan dan demokrasi bukan konsep yang sinonim, namun adanya pemilihan yang bebas dan kompetitif yang dipandang sebagai salah satu ciri kritis yang menetapkan suatu bangsa sebagai bangsa yang demokratis.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 (2006:14) tentang pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Menurut Rudy (2003:87) pemilihan umum adalah pengejawatan sistem demokrasi. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan atau dalam struktur pemerintahan.

Sementara itu Hungtison (dalam Toni, Efriza, dan Kemal 2006:301) berpendapat bahwa pemilu sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam Negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Dan ia juga berpendapat Negara modern adalah Negara demokratis yang memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik. Setiap jabatan publik ini merupakan arena kompetisi yang diperebutkan secara wajar dan melibatkan setiap warga Negara tanpa diskriminasi rasial, suku, golongan, dan stereo type lainnya yang meminimalkan partisipasi setiap orang.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pemilu adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap seseorang, dimana hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah pemilihan anggota legislatif ditingkat Kabupaten, yaitu pemilihan anggota legislatif Kabupaten Penjam Paser Utara.

Penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu

Sebelum membahas mengenai penetapan calon anggota legislatif ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu pengertian penetapan itu sendiri, penetapan/ketetapan adalah suatu keputusan yang diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Istilah penetapan sering kita dengar dalam hal yang berkaitan dengan agenda partai, misalkan penetapan

calon Legislatif, calon kepala daerah (Bupati, Wali Kota, Gubernur) bahkan calon eksekutif.

Mengenai pemaparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, calon legislatif, dan partai politik tentu akan lebih baik jika mampu dipahami secara mendalam agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas. yang dimaksud dengan Penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu adalah keputusan yang diambil oleh partai dalam mengusung seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif, yang dimana calon yang ditetapkan tersebut harus melalui proses pemilu yang akan di pilih secara langsung oleh rakyat.

Berkenaan dengan penelitian ini maka yang dimaksud penetapan calon anggota legislatif dalam pemilu adalah keputusan yang diambil oleh partai dalam mengusung seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif, yang dimana calon yang ditetapkan tersebut harus melalui melalui proses pemilu yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Partai Politik

Partai Politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasi diri. Maka dari itu dewasa ini di negara-negara baru partai politik sudah menjadi lembaga yang biasa dijumpai. Teori Partai Politik itu sendiri merupakan suatu kelompok organisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. (A. Rahman H.I, 2007 : 101).

Beberapa ahli mencoba mendefinisikan partai politik. Salah satunya adalah Miriam Budiarjo (2006:160-161), yang mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Sedangkan Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiarjo, 2008 : 404) mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Dalam UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan melihat gambaran mengenai partai politik tentunya dapat disimpulkan bahwa salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah adalah melalui partai politik, akan tetapi perlu dimengerti bahwa partai politik itu merupakan organisasi yang ada dalam suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan publik dengan cara menempatkan para wakilnya untuk duduk didalam lembaga negara. Dalam penelitian ini partai politik yang akan dikaji adalah Partai Golkar.

Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif di Partai Politik

Partai politik manapun membutuhkan proses kaderisasi dalam melanjutkan regenerasi kepemimpinan partainya, setiap anggota calon kader harus mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses pengkaderan, setiap calon kader akan mendapatkan pendidikan politik. Melalui sistem kaderisasi tersebut ketua partai atau pengurus partai mempunyai penilaian terhadap kader-kader yang nantinya akan direkomendasikan untuk menjadi calon yang mewakili partainya dalam lembaga legislatif melalui proses rapat pleno yang hanya dihadiri oleh ketua DPD partai dan pengurus partai Golkar.

Setelah itu yang menjadi kelanjutan dari dipilihnya calon anggota legislatif yang bukan dari kader partai Golkar akan menimbulkan perpecahan dari partai itu sendiri karena akan berdampak kecewanya para kader dan bahkan keluarnya kader dari partai Golkar, untuk mengatasi permasalahan tersebut partai Golkar harus memiliki strategi dalam menjaga kader-kader partainya agar tidak pindah kepartai lainnya, yang menjadi indikator dari strategi partai Golkar dalam menjaga kader-kadernya agar tidak pindah ke partai lainnya adalah dengan memberikan jabatan-jabatan yang strategis dan memberikan insentif atau gaji.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu adalah cara yang dilakukan oleh Partai Gololongan Karya di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan meneruskan eksistensi partainya dan mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Metodologi Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang penulis teliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran secara sistematis tentang Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Politik dalam Pemilu 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara).

Teknik analisis data yaitu teknik analisis data kualitatif deskriptif. Teknik analisis data kualitatif deskriptif digunakan untuk mengolah data-data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar, serta membuat penyadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi tertentu, sehingga analisis tersebut berdasar pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta data dan informasi yang ada.

Gambaran Umum Pemilihan Umum Anggota Legislatif Periode 2009-2014 di Kabupaten Penajam Paser Utara

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, membuka peluang untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif. Jumlah kursi yang didapat oleh masing-masing partai mengusung kadernya berdasarkan jumlah suara yang melebihi kuota yaitu diatas 1.000 (seribu) orang. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti Pemilihan Anggota legislatif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi menjadi 3 Daerah Pemilihan yaitu Dapil 1 (Penajam), Dapil 2 (Babulu, Waru) dan Dapil 3 (Sepaku). Adapun rekapan daftar calon yang diusung oleh partai Golkar priode 2009-2014 adalah sebagai berikut.

Table1. Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Golkar Berdasarkan Nomor Urut Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

No	DAPIL I (PENAJAM)		DAPIL 2 (WARU, BABULU)		DAPIL 3 (SEPAKU)
1	Hj. Zulaiha	1	Nanang Ali, SE	1	H. Dasuki Istad
2	Safaruddin, SH	2	Hj. Djumriah	2	Muslimin, S.Sos
3	Haidir	3	Arifuddin	3	Suparti
4	H.MuhammadYusup,SH	4	Arif Dermawan S, SP	4	Andi Gunawan Harahap
5	Jamaluddin	5	Hj. Hasmiah	5	Fadliansyah
6	Jalali Harahap	6	Daeng Sandrang	6	Petrus Datu
7	Mappema, SE	7	Aat Prawira Tanjung	7	Abdul Rahman
8	Dediansyah	8	H. Atan		
9	M. Bedu Mattaliu	9	Agustiyah, A.Md		
	Usman, SP		Jafri		

10		10			
11	Sudiby, SE				
12	Saimah				
13	H.Abdul Rais. H.I				

Sumber :KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa DPD partai Golkar telah melakukan proses penetapan calon legislatif kepada kader-kader partai, karena orang-orang yang diusung oleh partai Golkar 2009 seluruhnya adalah kader partai. Pada pemilu periode tahun 2009-2014 banyaknya partai yang mengikuti 34 partai tetapi masing-masing Dapil memiliki kemenangan jumlah partai politik yang berbeda. Seperti Dapil 1 memiliki 11 orang yang memiliki jumlah suara yang sah, Dapil 2 memiliki 8 orang yang memiliki jumlah suara yang sah sedangkan Dapil 3 memiliki 6 orang yang memiliki jumlah suara yang sah.

Dari Dapil I terdapat 11 nama yang diajukan oleh partai Golkar, peneliti berkesempatan untuk dapat mewawancarai 3 nama dari wilayah dapil 1 yaitu Safaruddin, SH, Jamaluddin, dan Sudiby, SE. Dari ketiga nama tersebut calon dapil 1 atas nama Sudiby, SE yang tidak mendapatkan hak suara cukup untuk dapat menjadi anggota legislatif dari partai Golkar. Sedangkan dari dapil 2 penulis berkesempatan untuk mewawancarai 2 orang calon dari partai Golkar yaitu Nanang Ali, SE dan Agustiyah, A.Md dan dari Dapil 3 penulis mewawancarai 2 calon yaitu Muslimin, S.Sos dan Abdul Rahman. Dari Dapil 2 dan Dapil 3 yang tidak mendapatkan kursi sebagai anggota legislatif adalah Agustiyah, A.Md dan Abdul Rahman. Hal ini dapat dilihat jelas dalam jumlah perhitungan suara sah sebagai hak calon yang diajukan menempati posisi sebagai anggota dewan perwakilan dari Partai Golkar dalam table dibawah ini :

Table 2. Daftar Nama Anggota Dewan DPRD Pemilihan Umum Tahun 2009-2014 Kabupaten Penajam Paser Utara Dapil 1 (Satu)

No	Partai Politik	No. Urut	Nama calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Partai Golongan Karya	4	H.Muhammad Yusuf, SH	1863	1
2	Partai Golongan Karya	5	Jamaluddin	1375	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	Sudirman, S. Sos	1167	1
4	Partai Demokrat	2	Jon Kenedi	1084	1
5	Partai Patriot	1	Drs. Baharuddin	1401	1
6	Partai Amanat Nasional	7	Ir. H.Hamdani	929	1
7	Partai Demokrasi Kebangsaan	1	Sarifah Ainun Jariyah	996	1

8	Partai Golongan Karya	2	Safaruddin, SH	1184	3
9	Partai Bulan Bintang	1	H. Rusbani, S. Sos	976	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4	Ahmad Badaraini	679	1
11	Partai Persatuan Pembangunan	1	Drs. Kamaluddin Sahar	690	1

Sumber : KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

Pada table di atas dapat dilihat bahwa pada Dapil 1 Penajam terpilih dari partai Golkar nomor urut 4 atas nama H. Muhammad Yusuf, SH mendapatkan jumlah suara sah 1863 suara, disusul oleh partai Golkar atas nama Jamaluddin dengan jumlah suara sahnya 1375, urutan ke 3 dengan jumlah suara 1401 dari Partai Patriot atas nama Drs Baharuddin.

Sedangkan pada Dapil 2 (Babulu, Waru), jumlah partai dengan suara pemilih yang sah ada 8 partai hal ini dapat dilihat di table 2 dibawah ini :

Tabel 3. Daftar Nama Anggota Dewan DPRD Pemilihan Umum Tahun 2009-2014 Kabupaten Penajam Paser Utara Dapil 2 (Dua)

No	Partai Politik	No. Urut	Nama calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Partai Golongan Karya	1	Nanang Ali. SE	3187	1
2	Partai Golongan Karya	2	Hj. Djumrah	1476	2
3	Partai Golongan Karya	5	Hj. Hasmiah	1138	3
4	Partai Demokrat	3	Hj. Anjarmas	997	1
5	Partai Patriot	1	Anwar Sanusi	954	1
6	Partai Bulan Bintang	1	Syamsudin Alie	1023	1
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	Hj. Sandra Puspa Dewi, SH	518	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	Wakidi, MA	507	1

Sumber KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

Pada table 3 terdapat daftar nama anggota legislatif dengan suara sah, urutan 1 dipegang oleh Partai Golongan Karya nomor urut 1 atas nama Nanang Ali, SE dengan jumlah suara 3187, urutan ke 2 dari partai Golkar atas nama Hj. Djumrah dengan jumlah suara sah 1476, sedangkan urutan ke 3 masih dengan Partai Golkar atas nama Hj. Hasmiah dengan jumlah suara 1138 dan posisi keempat oleh Partai Bulan Bintang atas nama Syamsudin Alie dengan jumlah suara 1023. Hal ini menunjukkan kekuatan partai Golkar di Dapil 2 sangat bagus karena 3 kader dari partai Golkar mendapatkan jumlah suara yang tinggi.

Pada Dapil 3 (Sepaku) dengan 6 partai yang memperoleh jumlah suara yang sah adalah partai Golongan Karya, Partai PDIP, PKS, PNIM, PGIR, hal ini dapat dilihat dalam table 4 dibawah ini :

Table 4. Daftar Nama Anggota Dewan DPRD Pemilihan Umum Tahun 2004-2009 Kabupaten Penajam Paser Utara Dapil 3 (Tiga)

No	Partai Politik	No. Urut	Nama calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Partai Golongan Karya	1	H. Dasuki Istad	1843	1
2	Partai Golongan Karya	4	Andi Gunawan Harahap	1093	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	Hartono Basuki, S.Pdi	947	1
4	Partai Keadilan Sejahtera	1	Sariman	578	1
5	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1	Musliman	906	1
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	Suyadi	300	1

Sumber KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

Dari table di atas dapat dilihat perolehan suara kader dari Partai Golkar masih mendominasi pada urutan 1 yaitu atas nama H. Dasuki Istad dengan perolehan suara sah sebanyak 1843 dan nomor 2 masih dari partai Golkar atas nama Andi Gunawan Harahap dengan perolehan jumlah suara sah 1093. Pada beberapa tabel di atas jelas terlihat kalau Partai Golkar mendapatkan perolehan suara yang paling banyak, walaupun partai lain mendapatkan suara, tetapi banyak yang tidak masuk kedalam kuota jumlah pemilih sehingga kader partai lainnya yang tidak masuk kuota tidak dapat masuk menjadi anggota legislatif Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2004-2009.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Kaderisasi Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara

Sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2004-2009 menggunakan sistem *Bottom Up* (usulan dari bawah) dengan metode yang digunakan adalah diskusi dan penyajian materi. Maksudnya di sini partai Golkar dalam melakukan kaderisasi lebih mengedepankan kader-kader dari tingkat desa atau yang lebih dikenal sebagai Karakterdes (Kaderisasi Tingkat Desa), karena desa adalah ujung tombak partai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan partai khususnya kaderisasi. Kader ini dicetak untuk meneruskan perjuangan organisasi dengan tetap mengacu pada program kerja dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Menjadi seorang kader harus melalui tahapan-tahapan kaderisasi yaitu 1) Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh partai politik 2) Memegang suatu

jabatan didalam susunan kepengurusan partai politik. 3) Menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan partai politik. Ketiga tahapan dilakukan untuk pengembangan diri dari setiap kader yang nantinya akan menjadi leader di tengah-tengah masyarakat.

Proses Penetapan Caleg Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara

Proses penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara pada pemilu 2009 dengan menggunakan sistem tertutup, dimana di dalam proses pengambilan keputusan. Ketua DPD partai Golkar membentuk tim yang di tugaskan untuk menyeleksi kembali kandidat siapa-siapa saja yang akan di usung oleh partai untuk menjadi calon legislatif dari partai Golkar, walaupun di dalam prosesnya partai Golkar menggunakan sistem tertutup dalam menentukan calon, partai Golkar sebenarnya juga memakai sistem terbuka tetapi hanya pada proses pendaftaran, karena partai Golkar membuka peluang kepada siapa saja yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon legislatif dari partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Partai Golkar dalam pemilu 2009 tidak menetapkan calon anggota legislatif yang bukan dari kader Golkar. Hal ini dikarenakan kader-kader partai dianggap mampu untuk meneruskan visi misi. Adapun yang menjadi bahan Pertimbangan partai Golkar dalam menetapkan calon anggota legislatif yang bukan dari kader partai Golkar seperti pada saat pemilu 2004 dan pemilu 2014 yaitu dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari kandidat yang mencalonkan diri, seperti dari aspek finansial dan ketokohnya, karena dalam pertimbangannya finansial dan ketokohan sangat berpengaruh dalam menunjang keterpilihan calon kandidat tersebut. Adapun mekanisme penyeleksian calon kandidat tersebut tim seleksi yang dibentuk oleh ketua DPD partai Golkar sangat menentukan calon tersebut akan diusung atau tidak oleh partai Golkar.

Strategi Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Menjaga Kader Partai

Strategi partai Golkar dalam menjaga kader partai untuk tidak pindah ke partai lainnya pada periode 2004-2009 yaitu dengan melibatkan pengurus-pengurus di tingkat desa dalam kegiatan-kegiatan partai, agar selalu menjaga silaturahmi dan mempererat rasa kebersamaan antar setiap kader dari pengurus desa sampai pengurus kabupaten partai Golkar di kabupaten penajam paser utara.

Kesimpulan

Kapasitas dan kapabilitas serta kredibilitas yang tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perekonomian dan infrastruktur adalah sesuatu yang diharapkan oleh partai Golkar untuk merekrut kader-kader yang berpotensi dan mampu diajukan sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum periode tahun 2004-2009 di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Proses rekrutmen yang diproyeksikan pada pemilihan anggota legislatif menunjukkan adanya peningkatan kualitas kader pada partai Golkar, hal ini terjadi pada pemilihan anggota legislatif untuk tahun 2004-2009 yang mana kader yang dipilih untuk menjadi anggota legislatif berasal dari dalam partai Golkar. Walaupun di dalam prosesnya partai Golkar menggunakan sistem tertutup dalam menentukan calon, partai Golkar sebenarnya juga memakai sistem terbuka tetapi hanya pada proses pendaftaran, karena partai Golkar membuka peluang kepada siapa saja yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon legislatif dari partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara

Diharapkan DPD partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara mengkolaborasikan antara sistem bottom up dari (bawah ke atas) dan sistem *top down* (dari atas ke bawah), supaya partai tidak hanya fokus pada kaderisasi di tingkat desa saja atau yang lebih dikenal sebagai Karekterdes (kaderisasi tingkat desa), tetapi partai Golkar juga harus lebih fokus kepada kaderisasi di tingkat nasional, agar nantinya elit-elit politik yang di dihasilkan dari proses kaderisasi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan apa yang di harapkan oleh partai Golkar itu sendiri, karena hasil dan kinerja dari para pemimpin di tingkat nasional dan di tingkat desa akan menjadi tolak ukur penilaian masyarakat terhadap baik buruknya citra partai Golkar di mata masyarakat

Daftar Pustaka

Andrianus Pito, Toni, dkk. *Mengenal Teori-teori Politik*, Nuansa, Bandung, 2006.

Suprihatini, Amin. *Partai Politik Di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2008.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Harahap, Abdul Asri, 2005. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Amal, Ichlasul, 1996. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.

King, Dwight Y., *Pemilihan Umum 1955 dan 1999 Keserupaan dan Kesenambungan*, Makmur Makka (Eds), Jakarta, 2002.

Moleong, Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Rahman H.I, A, 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rudy, T.May, *Pengantar Ilmu Politik*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003.

Soemantri. *Sistem-sitem Pemerintahan Negara*, Bandung. 1976.

S.Padmuji, *Teori Sistem dan Penerapannya dalam Manajemen*, Jakarta, Bima Aksara. 1985.

Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Syafii, inu kencana dan Azhari. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Cetakan Kelima. PT Refika Aditama. Bandung.

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang *Partai Politik*.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: Kep-227/Dpp/Golkar/I/2013 tentang *Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota Dpr-Ri, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten Kota Partai Golkar*.

Bidang Pengkaderan DPP Golkar. 2009. Rencana Induk Kaderisasi Partai GOLKAR (RIK-PG).

Sumber Internet :

(<http://id.wikipedia.org/wiki/penetapan>).

(<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/2304>).

(<http://forum.upi.edu/index.php?topic=5757.0>).

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/11/09/07/lr5o91_partai-nasdem-rayu-surya-paloh-untuk-bergabung).